

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER PASCA PANDEMI COVID 19 TERHADAP HARGA SAHAM DI INDONESIA

Nadya Ananda Effendi¹, Silvia Angrie Nst², Muhammad Aldrian Oktofa³,
Muhammad Ikhsan Harahap⁴

nadyaananda2105@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

silviaangrie@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mochaldrianoktofa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

m.ihсан.harahap@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Perkembangan pasar saham saat ini sudah sangat berkembang seiring dengan majunya teknologi saat ini. bisa dilihat dengan sudah banyaknya masyarakat memanfaatkan teknologi seperti internet. Membuat gebrakan pasar saham menjadi lebih besar. Dan juga menyebabkan banyaknya muncul-muncul perusahaan/enterpenuer baru. Dan juga dengan banyaknya perusahaan dan enterpenur-enterpenur baru ini menyebabkan mereka harus ikut ke pasar saham. sebab dengan adanya partisipasi dari perusahaan-perusahaan tersebut membuat mereka mendapat keuntungan dengan mendapatkan tambahan dana untuk perusahaan mereka agar perusahaan mereka dapat mengekspansikan perusahaan mereka agar di kenal ke penjuru dunia. Tapi hal ini sempat menjadi terhambat karna adanya pandemic covid-19 pada awal 2020 sampai periode juni 2022. Selama masa itu pasar saham di Indonesia sangat-sangat rusak, karna adanya pandemic tersebut. Terjadinya banyak pembatasan transaksi-transaksi ekonomi yang menyebabkan perekonomian menjadi hancur. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan kebangkrutan karna efek dari pandemic ini. Oleh karna ini pemerintah pun mengambil kebijakan ekonomi yaitu, dengan memberlakukan kebijakan fiskal dan moneter, yang diharap dapat membuat pembaruan baik bagi ekonomi indonesia

Kata Kunci : Fiskal dan Moneter, Pandemi Covid-19, Saham

Abstract

The development of the stock market is currently very developed along with the advancement of technology today. It can be seen that many people have used technology such as the internet. Making the stock market buzz even bigger. And also led to the emergence of many companies / new entrepreneurs. And also with the many companies and new entrepreneurs, they have to join the stock market. Because the participation of these companies makes them benefit by obtaining additional funds for their companies so that their companies can expand their companies so that they are known to the public. corners of the world. However, this was hampered due to the Covid-19 pandemic in early 2020 until the June 2022 period. During that time the stock market in Indonesia was very, very damaged, because of the pandemic. There were many restrictions on economic transactions that caused the economy to collapse. Many companies have experienced losses and even bankruptcy because of the effects of this pandemic. Because of this, the government also took economic policies, namely, by implementing fiscal and monetary policies, which are expected to make good reforms for the Indonesian economy

Keywords : Fiscal and Monetary, Pandemic Covid-19, Stock

A. PENDAHULUAN

China memperkenalkan vaksin virus corona pertama pada 7 September 2020 (CNN, 2020). Ini menunjukkan penemuan vaksin COVID-19. Penemuan vaksin COVID-19 mendorong pasar keuangan dan modal. Penemuan tersebut menimbulkan harapan baru bahwa pandemi akan segera berakhir, meskipun vaksin belum tersedia di Indonesia pada awal September. Perekonomian dan aktivitas telah menurun karena pandemi COVID-19. Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai dengan rekomendasi WHO untuk physical distancing, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang semakin meningkat (Nursalam et al., 2021). Orang-orang disarankan untuk tetap di rumah dan tidak bepergian kecuali untuk kebutuhan tertentu. Pembatasan operasi skala besar akan menyebabkan situasi ekonomi yang lebih sulit dan mempengaruhi daya beli sendiri. Masyarakat otomatis mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok atau primer, sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier yang tidak mendesak bisa ditunda dulu.

Kementerian Perindustrian secara aktif meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan industri untuk tetap produktif dengan Industri 4.0, antara lain melalui penilaian Indeks Kesiapan Industri 4.0 Indonesia (INDI 4.0) secara daring untuk mempercepat transisi pelaku industri ke Industri 4.0 (Kementerian).

Kantor Humas Industri, 2020). Transisi ke Industri 4.0 membawa manfaat bagi perusahaan industri dengan mengurangi biaya dan waktu henti, meningkatkan kinerja mesin dan peralatan, meningkatkan kecepatan produksi dan kualitas produk, serta menyesuaikan praktik yang sehat. Pengenalan Industri 4.0 dipandang sebagai strategi yang tepat untuk merevitalisasi sektor industry di dalam negeri dalam menghadapi fase adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kemungkinan penerapan kebijakan penghentian akan berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi penduduk. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memperkenalkan langkah-langkah social distancing, yang dapat diartikan sebagai menjaga jarak antar masyarakat dan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai wilayah. Melalui PSBB, pemerintah dapat membatasi aktivitas di tempat umum, memaksa masyarakat untuk bekerja dari rumah, menghilangkan pekerjaan, menutup pusat perbelanjaan, dll. Pilihan ini dinilai cukup tepat untuk memprioritaskan program perlindungan kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, namun tidak menghentikan bisnis sepenuhnya. Pemerintah Indonesia menghadapi pilihan sulit, karena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 tidak separah dampak kesehatan yang dihadapi penduduk. Kendala sosial yang ada di masyarakat menghambat pertumbuhan ekonomi di hampir semua sektor ekonomi, termasuk pariwisata dan industri. Larangan perjalanan dan perintah tinggal di rumah dari pemerintah telah menguji industri pariwisata, sementara industri manufaktur menghadapi kekurangan bahan baku dan penurunan permintaan barang karena melemahnya ekonomi. Pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan bagi perusahaan untuk tetap bertahan sambil terus berbisnis di tengah ketidakpastian akhir dari pandemi ini. Pengusaha bersaing dengan mencapai efisiensi dengan mengurangi biaya operasi untuk memulihkan kerugian yang terjadi. Efisiensi dapat dicapai dengan mengurangi biaya tenaga kerja, dan bahkan dalam kondisi terburuk, pengusaha tidak punya pilihan selain memberhentikan sebagian karyawannya. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek domino yang cukup mengkhawatirkan, yaitu berkurangnya konsumsi tenaga kerja seiring dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Pandemi Covid-19 tidak hanya berkembang menjadi krisis

kesehatan yang serius, tetapi telah mengubah krisis ekonomi yang berkepanjangan ini menjadi resesi ekonomi.

Untuk mendorong perekonomian, pemerintah melanjutkan kebijakan keuangan ekspansif. Insentif perpajakan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam bentuk bantuan pengelolaan perpajakan tertuang dalam dokumen KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Terkait Penyebaran Virus Corona-19 sejak 14 Maret 2020 sampai dengan April. 30 Tahun 2020 sebagai kendala yang sangat besar di bidang perpajakan sehingga dilaksanakan fasilitas administrasi yang bertujuan untuk mengurangi beban pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi kebijakan perpajakan melalui PMK No. 110 Tahun 2020 yang mengubah PMK No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona 2019 Sebelumnya PMK No. 44 Tahun 2020 yang semula merupakan perpanjangan dari PMK nomor 23 tahun 2020. Bantuan darurat yang diperkenalkan pemerintah diharapkan dapat menjadi stimulus fiskal, mengurangi beban operasional usaha dan memperbaiki kondisi arus kas perusahaan. apalagi di masa pandemi ini. Diharapkan para pengusaha dapat memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan pemerintah untuk memitigasi penurunan dan kerugian penjualan selama pandemi Covid-19, sehingga kelangsungan usaha tetap terjaga.

Melihat kondisi riil dan prakiraan stagnasi pertumbuhan ekonomi dan moneter yang dihadapi Indonesia akibat pandemi Covid-19, menarik dilakukan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan global. perspektif kebijakan fiskal nasional, dimana fungsi pajak merupakan instrumen yang memberikan fleksibilitas dalam hal penerimaan (anggaran) pemerintah yang berkelanjutan, operasi reguler, dan stabilitas keuangan untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional.

Melihat kondisi riil dan prakiraan stagnasi pertumbuhan ekonomi dan moneter yang dihadapi Indonesia akibat pandemi Covid-19, menarik dilakukan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan global. perspektif kebijakan fiskal nasional, dimana fungsi pajak merupakan instrumen yang memberikan fleksibilitas dalam hal penerimaan (anggaran) pemerintah yang

berkelanjutan, operasi reguler, dan stabilitas keuangan untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi kondisi pasar. Kebijakan fiskal yang diprakarsai pemerintah dapat bersifat ekspansif atau kontraktif tergantung kondisi ekonomi yang dapat dicapai (Fauziah Aqmarina, 2020). Kebijakan fiskal yang stimulatif diterapkan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pembayaran transfer dan subsidi, serta mengurangi pemotongan pajak. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal kontraktif dapat dimulai dengan memangkas pengeluaran pemerintah, mengurangi transfer dan subsidi, serta memperkuat pemotongan pajak.

Pandemi COVID-19 mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk dunia pasar modal dan perbankan. Pandemi berdampak negatif pada pasar-pasar penting (Erdem, 2020). Pasar modal di seluruh dunia mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penurunan ini lebih besar dari kejadian yang sama, yaitu wabah penyakit menular yang dulu melanda dunia (Baker et al., 2020). Sebuah studi oleh Arendt & Mestas (2021) menemukan hubungan positif antara volume berita tentang COVID-19 dan jatuhnya harga saham. Perbankan merupakan salah satu industri yang berpengaruh signifikan terhadap nilai IHSG Bursa Efek Indonesia. Perbankan adalah salah satu industri tersibuk selama COVID-19. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh iklim global dan sikap investor. Sikap ini adalah investor enggan berinvestasi pada aset berisiko dan lebih memilih memegang uang tunai. Selain itu, investor lebih memperhatikan risiko kredit yaitu default risk yang merupakan risiko bagi investor yang berinvestasi di sektor perbankan. Investor semakin pesimis dengan kelangsungan hidup perusahaan dengan utang tinggi dan aset (kas) rendah (Ramelli & Wagner, 2020).

Hal ini diperparah dengan lockdown dan social distancing yang membatasi pergerakan masyarakat, melemahkan perekonomian dan meningkatkan kredit macet. Oleh karena itu, selama pandemi COVID-19, bank fokus untuk meminimalkan gagal bayar dengan membatasi besaran pembayaran pinjaman. Kekhawatiran tentang ketidakamanan pendapatan dan pesimisme meningkat berkat informasi yang tersedia (Liu et al., 2020).

Pendapatan terbesar bank berasal dari penyaluran kredit kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi harga saham bank. Jika jumlah kompensasi pinjaman menurun, hal ini menyebabkan penurunan pendapatan bank, yang menurunkan harga saham bank.

Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, terutama di negara berkembang. Pemerintah dapat mempengaruhi upah nasional, jam kerja, investasi nasional dan distribusi sumber daya nasional melalui kebijakan fiskal. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19, Pendapatan negara diperkirakan menurun sekitar 10% tahun ini. Penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19 terutama akan terjadi pada sisi fiskal.

Dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal tidak diragukan lagi, karena berperan penting dalam mengatasi dampak COVID-19. Di sisi keuangan, pemerintah juga menyelesaikan kajian alokasi anggaran dan refocusing agenda. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Instruksi Presiden No. 4/2020, yang memberikan instruksi kepada semua pegawai jajaran kementerian serta para pemimpin, termasuk pejabat di tingkat daerah, untuk memastikan fokus tetap pada kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini berfungsi sebagai seruan untuk bertindak menangani wabah Covid-19.

Sesuai Perppu No.1/2020, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN di mana anggaran yang diperlukan langka atau tidak ada. Pemerintah juga berwenang menetapkan keuangan negara, proses dan tata cara pengadaan barang dan jasa, serta penyederhanaan mekanisme dan penyederhanaan dokumen.

Pengeluaran dalam keadaan mendesak hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, SDM dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Keputusan pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk wabah Covid-19 relatif tidak berbeda dengan keputusan negara-negara maju yang mencatatkan jumlah kasus positif dan kematian akibat Corona terbanyak di dunia.

Untuk mengatasi COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan keuangan dan moneter yang komprehensif. Di sektor keuangan,

pemerintah mengutamakan inisiatif dan redistribusi sumber daya. Pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi PPN dari sisi penerimaan, dan PPh Badan dari sisi pengeluaran.

Untuk menjaga konsistensi dan memprioritaskan inisiatif perencanaan pandemi untuk mengakomodasi defisit anggaran, pemerintah harus dapat menilai sepenuhnya realitas dengan menggunakan data yang relevan. Kebijakan fiskal pemerintah yang bertumpu pada tiga stimulus terhadap output dan inflasi perekonomian Indonesia dapat terlihat jelas.

B. METODE PENELITIAN

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan di jurnal online nasional. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan mesin pencari Google Scholar untuk mencari jurnal penelitian yang dipublikasikan di Internet dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut: Kebijakan fiskal dan moneter, harga saham, dampak Covid 19.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyaring sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing-masing penulis jurnal. Ketentuan pengiriman makalah adalah sebagai berikut:

1. Tahun rujukan jurnal dari 2019 sampai 2023 harus sesuai dengan hasil artikel dan kepentingan pembahasan artikel
2. Strategi pengumpulan berbagai jurnal sastra menggunakan situs jurnal terakreditasi seperti Scholar.
3. Peneliti kemudian mencari website majalah yang dipilih dengan menggunakan kata kunci yang dimasukkan di kolom pencarian mesin pencari
4. Kemudian peneliti menelaah jurnal berdasarkan abstrak jurnal dan juga melakukan evaluasi kritis terhadap jurnal tersebut untuk menentukan apakah jurnal tersebut kredibel atau tidak ketika digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi ketika kasus COVID-19 pertama ada di Indonesia dapat memicu suatu sentimen pesimis di dunia pasar modal. Investor biasanya mencari keamanan

dengan aktif menjual saham yang mereka pegang. Hal ini menyebabkan harga saham turun dibandingkan sebelum merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Fenomena ini memicu respon psikologis yaitu kecemasan investor. Investor juga mengkhawatirkan risiko kredit, terutama risiko gagal bayar, yang dihadapi investor saat berinvestasi di sektor perbankan. Risiko kredit yang tinggi juga mempengaruhi pengembalian ekuitas yang diterima investor. Selain itu, memegang uang tunai terasa lebih menjanjikan dan membawa keamanan bagi investor daripada berinvestasi di aset berisiko.

Keadaan pada saat pengumuman kasus positif COVID-19 yang pertama membuat investor pesimistis dan banyak saham yang dijual sehingga menyebabkan harga saham turun. Selama pandemi COVID-19, bank berfokus untuk meminimalkan gagal bayar dengan membatasi besaran pembayaran pinjaman. Ini adalah konsekuensi buruk dari penutupan dan jarak sosial. Kebijakan tersebut membatasi ruang gerak dan aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan melemahnya perekonomian. Banyak peminjam (debitur) tidak dapat melunasi pinjamannya karena kesulitan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Akibatnya, kredit bermasalah meningkat.

Penemuan vaksin untuk melawan COVID-19 membawa harapan baru bagi seluruh dunia, termasuk pasar modal. Pencarian vaksin untuk melawan COVID-19 adalah faktor terpenting di pasar keuangan dan pasar modal. Hampir semua industri positif dengan hasil vaksin ini. Sektor perbankan merupakan industri yang akan diuntungkan dua kali lipat dari efektifitas vaksin COVID-19. Ini karena sifat perbankan adalah siklus saham. Artinya, ketika ekonomi kembali normal, saham sektor siklus akan lebih diuntungkan dibandingkan sektor lainnya. Sektor perbankan merupakan saham siklus yang bergantung pada perekonomian yang lebih mendukung sektor perbankan.

Kondisi ekonomi dapat membaik secara bertahap yang dapat memungkinkan penyaluran kredit di sektor perbankan yang sebelumnya bank telah melakukan pembatasan penyaluran kredit untuk meminimalkan risiko kredit. Selain itu, kredit macet dapat dikurangi dan provisi dikurangi, dan laba bersih meningkat. Membaiknya kondisi ekonomi membuat sentimen investor tetap positif karena investor membeli kembali saham bank dan mendorong saham bank.

Kebijakan Fiskal Dan Moneter Menghadapi Covid 19

Kebijakan fiskal ini merupakan pilihan pemerintah untuk memenuhi jumlah pengeluaran atau pengeluaran yang besar dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam praktiknya, beberapa urusan tersebut ditangani oleh Pemerintah Pusat yang ada di setiap provinsi dan lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan fiskal memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi nasional yang digalakkan oleh pemerintah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk membantu pemerintah memperbaiki keadaan perekonomian dengan meningkatkan arus barang dan jasa. Kebijakan fiskal ini terdiri dari dua komponen yakni ekspansif dan kontraktif. Menurut (Wulandari, dkk, 2015) Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi dan peningkatan potongan pajak.

(Maulida, 2018) mengemukakan bahwa kebijakan fiskal dapat dikategorikan berdasarkan teori dan jumlah pemasukan dan pengeluarannya. Pertama, kebijakan fiskal berdasarkan teori dan terdiri dari kebijakan fiskal fungsional, disengaja dan tidak disengaja. Kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan pengeluaran dan pendapatan anggaran dengan menilai kemungkinan yang akan terjadi terhadap pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal bersifat disengaja, yaitu kebijakan dengan meminimalkan pengeluaran anggaran. Kebijakan fiskal disengaja mengambil tiga bentuk berbeda.

Pertama kurangi pengeluaran pemerintah. Kedua, mengubah sistem pemungutan pajak. Ketiga, harmonisasi pelaksanaan anggaran pemerintah dan sistem perpajakan. Sebaliknya, kebijakan finansial tidak disengaja adalah dukungan finansial untuk mempercepat siklus bisnis agar lebih stabil. Pernyataan ini bisa mengacu pada harga minimum, jadwal pembayaran progresif atau bahkan proposal. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dikonsolidasikan berdasarkan jumlah pengeluaran dan pendapatan yang signifikan. Di antaranya kebijakan fiskal seimbang, kontraktif/surplus,

ekspansif/defisit, dan dinamis. Kebijakan fiskal seimbang, yakni kebijakan yang dilakukan untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Hal ini berdampak positif karena tidak menimbulkan utang bagi negara. Namun jika perekonomian negara saat ini tidak dalam kondisi yang baik, perekonomian akan menjadi kurang kuat.

Kebijakan fiskal kontraktif/surplus, yakni kebijakan yang mengatur jumlah pendapatan negara harus lebih dari pengeluaran. Ketika negara mengalami inflasi maka kebijakan ini bisa dilakukan. Kebijakan fiskal ekspansif/defisit, yakni kebijakan yang mengatur agar pengeluaran atau belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Ketika ekonomi negara mengalami depresi maka pemerintah dapat melakukan kebijakan ekspansi sebagai strategi. Selanjutnya kebijakan fiskal dinamis, yakni kebijakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk keuangan mengadakan pendapatan seiring dengan berjalannya waktu.

Respon terhadap Covid-19 diperkuat dengan membantu penyediaan fasilitas dan peralatan medis, obat-obatan, insentif bagi tim medis untuk merawat pasien Covid-19 dan kebutuhan lainnya. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako dan Beras Sejahtera. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehari-hari Kementerian atau Lembaga ataupun Pemda diharapkan dapat memperluas portfolionya dengan dana desa. Sebaliknya, intensif dilakukan di bidang usaha untuk membantu para pelaku usaha, terutama di sektor UMKM dan sektor informal.

Untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, kebijakan moneter yang diterapkan harus terintegrasi dengan kebijakan fiskal. Untuk itu, otoritas moneter harus mampu mengendalikan nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan dukungan finansial kepada dunia usaha. Diharapkan ada kesepakatan pemberian pinjaman bank dan mengintensifkan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berfokus pada anggaran negara dan perpajakan. Kebijakan ini erat kaitannya dengan ekonomi makro karena pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian pendapatan dan pengeluaran publik untuk mencapai stabilitas

keuangan yang lebih baik dan kecepatan pembangunan ekonomi yang diinginkan yang biasanya ditentukan oleh rencana pembangunan.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah manipulasi jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menstabilkan atau merangsang perekonomian. Dalam perekonomian saat ini, kebijakan moneter merupakan mekanisme yang lebih efektif untuk mengatasi resesi dan mengurangi pengangguran daripada kebijakan fiskal.

Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat bunga yang lebih rendah meningkatkan konsumsi dan investasi, yang meningkatkan permintaan agregat.

Kebijakan moneter dioperasikan untuk menjaga agar uang tetap beredar di masyarakat. Di sisi lain, tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk menciptakan stabilitas.

Tabel 1 IHSG 2021

	IHSG
Kwartal 1	6.800
Kwartal 2	6.200
Kwartal 3	6.600
Januari 2022	6.698

Dari tabel di atas, terlihat bahwa IHSG membukukan angka positif sejak kuartal I hingga Januari. Rata-rata sekitar 6.500.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,29% menjadi 6.581,48 pada perdagangan terakhir 2021 pada Kamis (30/12) Pada tahun 2021, IHSG mencapai titik tertinggi sepanjang masa, mencapai 6.723,39 pada tanggal 22 November 2021. Di posisi 6.436,95, IHSG akhirnya mencapai titik tertingginya di awal tahun. Volatilitas memang tidak sekuat tahun lalu, namun berubah di hari terakhir bulan Januari dan awal Februari 2021. Ada beberapa sentimen positif saat itu, termasuk pengumuman pemerintah bahwa Tesla bersedia berinvestasi di Indonesia. Beberapa perusahaan tambang nikel juga membukukan laba positif.

Pergerakan IHSG justru ambruk ke 5.861,90 di bulan kedua tahun 2021 ini. Jatuhnya indeks tersebut tak lepas dari feeling negatif yang diciptakan pemerintah,

di mana jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat tajam saat itu. Namun, indeks rebound lagi antara 6.040 dan 6.376 di bulan Februari dan akhir Maret. Mendekati bulan baru, IHSG kembali mendapat tekanan berat baik secara internasional maupun domestic.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pasca pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap harga saham di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengganggu perekonomian secara global, termasuk pasar saham Indonesia, dan sebagai respons pemerintah mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Pentingnya pemahaman terhadap dampak kebijakan fiskal dan moneter pasca pandemi COVID-19 terhadap harga saham di Indonesia terletak pada kemampuan regulator dan investor untuk mengambil keputusan yang tepat dalam konteks kebijakan ekonomi dan investasi di masa depan. Penelitian ini memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam memahami korelasi antara kebijakan pemerintah dan dinamika pasar saham.

Namun, perlu diingat bahwa faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi harga saham, seperti kondisi ekonomi global dan faktor fundamental perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam analisis harga saham secara holistik.

Kesimpulan ini menyiratkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang cermat dan terukur pasca pandemi COVID-19 dapat berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan pasar saham di Indonesia. Implikasi penelitian ini dapat digunakan oleh regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi pasca pandemi dan memanfaatkan peluang investasi yang muncul.

Daftar Pustaka

- Alfira, N., Fasa, M., & Suharto, S. (2021). Pengaruh Covid-19 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Nilai Tukar Rupiah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(3), 313-323.
- Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian Kritis Ekonomi Syariah Dalam Menelisis Kebijakan Moneter Sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian Ditengah Pandemi Corona Virus Disease-19, *Jurnal Bonanza: Manajemen dan Bisnis* 1(2), 80-97.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152.
- Hidayah, S. N., Yusuf, S. D., & Ajuna, L. H. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Volume 3, Nomor 1.
- Lailiyah, E. H., Dewi. A., & Nataliawati, R. (2021). Stock Price dan COVID-19 : Sebuah Studi Perbandingan pada Sektor Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 9 No. 1, 77-82.
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian, *Jurnal Ekonomi*, Vol 23. No. 3
- Maharani, Y., & Marheni, M. (2022). Strategi Kebijakan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(02), 234-244.
- Purnaningrum, E. (2021). Model Dynamic Ensemble Time Series untuk Prediksi Indeks Harga Saham Utama di Indonesia Pasca Pandemi. *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 26 No. 1, 1-7.
- Setiawan & Asbaniar. (2021). Analisis Kinerja Saham Pada Industri Farmasi Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19, *IQTISHADequity*, Volume 4, No. 1, 45-54.
- Siri, R., Hasniaty. H., & Mariana. L. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika*, Vol. 6 No. 1, 96-109.